

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK  
BERSUBSIDI MELALUI KARTU PETANI BERJAYA  
(Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
NABILA**

**NPM. 1916041006**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK  
BERSUBSIDI MELALUI KARTU PETANI BERJAYA  
(Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Oleh :

**NABILA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU PETANI BERJAYA (Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Oleh

**Nabila**

Pembangunan nasional dalam sasarannya memiliki beberapa sektor yang harus tercapai salah satunya adalah di sektor pertanian. Guna mencapai hasil pertanian yang optimal maka langkah yang ditempuh pemerintah adalah dengan pemberian pupuk bersubsidi bagi petani. Pada Provinsi Lampung pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya didasari dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kartu Petani Berjaya, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pupuk bersubsidi petani terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh deskripsi dan analisa mengenai pelaksanaan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dari pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan dua unsur implementasi menurut Merile S. Grindle yakni Isi Kebijakan (*Context of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Content of Policy*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo belum berjalan optimal dikarenakan pendistribusian masih belum sepenuhnya menggunakan kartu petani berjaya, keterlambatan pengiriman pupuk dan kuota pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dirasa memberatkan petani. Adapun faktor penghambat implementasi adalah kekurangan sumber daya penyuluh pertanian lapangan, permasalahan teknis dan jaringan serta petani lansia yang sulit memahami penggunaan kartu petani berjaya.

**Kata kunci : Implementasi, Pupuk subsidi, Kartu Petani Berjaya, Petani**

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION  
POLICY THROUGH BERJAYA FARMER CARD  
(Study in Tiyuh Margo Mulyo Tumijajar District  
Tulang Bawang Barat Regency)****By****Nabila**

*National development in its goals has several sectors that must be achieved, one of which is in the agricultural sector. In order to achieve optimal agricultural results, the steps taken by the government are the provision of subsidized fertilizers for farmers. In Lampung Province, the distribution of subsidized fertilizers through the Berjaya farmer card is based on the provisions of Governor Regulation Number 9 of 2020 concerning the Berjaya Farmer Card, which aims to ensure the availability of subsidized fertilizer needs of farmers are met. The purpose of this study is to obtain a description and analysis of the implementation of subsidized fertilizer distribution policies through the Berjaya farmer card in Tiyuh Margo Mulyo, Tumijajar District, West Tulang Bawang Regency. The method used is descriptive qualitative from data collection by interview, observation, and documentation. The research analysis uses two elements of implementation according to Merile S. Grindle, namely the Content of Policy (Context of Policy) and the Policy Environment (Content of Policy). The results showed that the implementation of the subsidized fertilizer distribution policy through the successful farmer card in Tiyuh Margo Mulyo has not run optimally because the distribution is still not fully using the successful farmer card, the delay in fertilizer delivery and the subsidized fertilizer quota that does not match the needs in the field are considered burdensome for farmers. The factors inhibiting implementation are the lack of field agricultural extension resources, technical and network problems and elderly farmers who find it difficult to understand the use of farmer cards.*

**Key Words : Implementation, Fertilizer subsidy, Berjaya Farmer Card, Farmer**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI  
MELALUI KARTU PETANI BERJAYA  
(Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan  
Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama Mahasiswa : **Nabila**  
No Pokok Mahasiswa : **1916041006**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

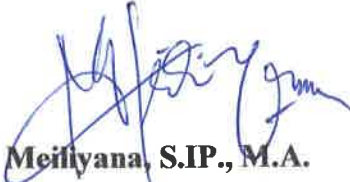
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si**  
NIP 19691103 200112 1 002

  
**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**  
NIP 19780923 200312 1 001

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
**Meilyana, S.IP., M.A.**  
NIP 19740520 200112 2 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



Sekretaris : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Penguji : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**

NIP 19610807 198703 2 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 November 2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 November 2023  
Yang Menyatakan,



Nabila  
NPM. 1916041006

## RIWAYAT HIDUP



Nabila, lahir di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada tanggal 6 Juni 2001 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Jauhari dan Ibu Linawati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Al-Furqon tahun 2007-2013, selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Tulang Bawang Tengah tahun 2013-2016, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah tahun 2016-2019, dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung jurusan Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam mengikuti organisasi tingkat Universitas, maupun Jurusan yakni, DPM UNILA, BEM UNILA, KOPMA UNILA, dan HIMAGARA. Pada tahun 2021 penulis mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kemendikbud yakni Kampus Mengajar pada bulan Agustus hingga desember di SDIT AL BAYAN, Tulang Bawang Barat. Pada bulan Maret hingga Agustus 2022 Magang Merdeka di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Lalu pada Januari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

*“Mengubah siang menjadi malam saja Allah mampu, apalagi mengubah nasibmu.”*

**(QS. Ali Imran: 27)**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

**(QS. Ar-Ra’d: 11)**

*“Selalu libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun, trust to Allah for everything no matter what”*

**(Nabila)**

## PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim  
Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang Maha Sempurna.  
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah  
Rasulullah Muhammad SAW*

*Dengan ketulusan hati dan rasa sayang yang tiada henti,  
Ku persembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta,  
kasih sayang, dan terima kasihku kepada:*

*Ayahku (Jauhari) dan Ibuku (Linawati) tercinta,  
yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang  
dengan seluruh pengorbanan yang tulus, tanpa lelah selalu mendokan dan  
melakukan semua yang terbaik untuk keberhasilan dan kebahagiaanku*

*Saudari ku tersayang  
Kakak perempuanku (Chealsie Corera), adik perempuanku (Kayla Zulaika)  
yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta selalu membantu  
menyelesaikan masalah apapun yang aku hadapi*

*Keponakan ku tercinta  
Muhammad Elzio Visi yang sudah lahir ditengah-tengah kami sehingga  
menambah semangat untuk menyelesaikan skripsi*

*Para pendidik yang telah mengajar dengan penuh kesabaran  
Serta sahabat seperjuangan ku Fentika, Faradilla dan Diva yang begitu tulus  
menyayangiku dengan segala kekuranganku, selalu memberikan semangat dan  
dukungan yang tulus untukku*

*Almamater Universitas Lampung tercinta*

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih untuk seluruh saran dan ilmu yang Prof berikan kepada penulis. Terimakasih untuk selalu mengingatkan dalam setiap proses penulisan skripsi. Terimakasih juga karena Prof selalu sabar ketika memberikan arahan dan bersedia untuk membimbing penulis sampai akhir. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi Prof Noverman.
2. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P, selaku dosen pembimbing pendamping penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang Bapak berikan kepada penulis. Terimakasih juga karena Bapak selalu sabar ketika mengarahkan penulis mengenai penelitian yang peneliti lakukan. Semoga Pak Eko selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.
3. Miss Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D, selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang Miss berikan kepada penulis sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai. Serta

terimakasih untuk seluruh ilmu yang sudah Miss berikan kepada saya. Semoga Miss Intan selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.

4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen maupun staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu dan nasihat selama proses perkuliahan.
9. Bapak Ali Gufron, Ibu Sumaryana, Ibu Fahmi, Ibu Setyaningsih, Ibu Ely serta Ibu Sayu selaku informan dalam penelitian ini, terima kasih atas waktu dan dedikasi nya untuk membantu dalam proses pengambilan data
10. Kepada teman-teman seperjuanganku GRANADA, terimakasih untuk waktu yang telah dilewati bersama.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jauhari dan Ibu Linawati yang selalu tulus mendoakan, dan memberikan dukungan baik secara moril maupun material, juga memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Bandar Lampung, 10 November 2023  
Penulis,

**Nabila**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	-
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	14
2.3 Implementasi Kebijakan Publik .....	15
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.3.3 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	19
2.4 Pengertian Pupuk Bersubsidi.....	26
2.5 Program Kartu Petani Berjaya.....	27
2.5.1 Pengertian Program Kartu Petani Berjaya .....	27
2.5.2 Manfaat Kartu Petani Berjaya .....	28
2.6 Kerangka Pikir.....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian .....	33
3.3 Lokasi Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	41

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1	Gambaran Umum Tiyuh Margo Mulyo .....	44
4.1.2	Keadaan Penduduk Tiyuh Margo Mulyo .....	46
4.2	Hasil Penelitian.....	48
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	78

#### **V. KESIMPULAN.**

5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Saran.....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 .....	4
2. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Non Subsidi Tahun 2023.....	5
3. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 .....	5
4. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 Menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Kabupaten/Kota.....	6
5. Penelitian Terdahulu .....	12
6. Informan Penelitian.....	38
7. Data Dokumen Penelitian .....	39
8. Data Guna Lahan Tiyuh Margo Mulyo.....	45
9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	46
10. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	47
11. Data Kelompok Tani Tiyuh Margo Mulyo .....	47
12. Data RDKK Alokasi Pupuk Subsidi Tiyuh Margo Mulyo .....	52
13. Data e-Alokasi Pupuk Bersubsidi Tiyuh Margo Mulyo .....	53
14. Matriks Data Hasil Penelitian Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Distribusi Pupuk Subsidi .....	2
2. <i>Pendekatan Implementation as A Political and administrative Process</i> Grindlle .....	25
3. Kerangka Pemikiran.....	31
4. Teknik Analisis Data.....	41
5. Peta Wilayah Tiyuh Margo Mulyo .....	45
6. Tampilan menu e-KPB.....	51
7. Sosialisasi Kartu Petani Berjaya oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Lampung .....	65
8. Peluncuran Kartu Petani Berjaya .....	67
9. Sosialisasi Kartu Petani Berjaya oleh PPL.....	68
10. Mekanisme Penyusunan RDKK .....	82
11. Mekanisme penetapan alokasi pupuk subsidi .....	83



## **I. PENDAHULUAN**

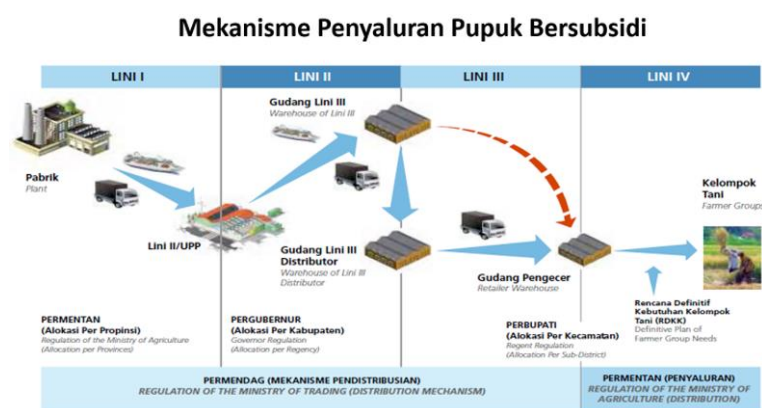
### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat luas. Pembangunan nasional dalam sasarannya memiliki beberapa sektor yang harus tercapai salah satunya adalah disektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor penting karena berkaitan langsung dengan upaya penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tersebut diberikan dalam bentuk kebutuhan pangan, hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Terdapat beberapa langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut dan salah satunya ialah dengan pemberian pupuk bersubsidi bagi petani.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Pupuk bersubsidi dapat dikatakan sebagai sarana produksi pertanian (saprota) yang dimanfaatkan untuk menstimulasi peningkatan produksi usaha tani, salah satunya digunakan pada tanaman padi. Stimulasi peningkatan produksi usaha tani yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan usaha tani. Oleh karena itu, aksesibilitas pupuk dari segi kuantitas, kualitas, dan harga yang terjangkau harus dapat dijamin oleh pemerintah. Ketersediaan distribusi pupuk subsidi harus memenuhi kriteria enam tepat (waktu, harga, jenis, jumlah, mutu, dan tempat) sehingga dapat meningkatkan efisiensi usahatani, yang berimplikasi pada peningkatan

pemanfaatan lahan dan penggunaan benih yang secara sinergis berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian (Kasiyati, 2010). Pemerintah harus mampu menjaga peredaran subsidi pupuk dan kemudahan petani mengakses subsidi pupuk dengan melakukan beberapa pengawasan. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan kemudahan petani mengakses pupuk bersubsidi dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan. Selain itu, strategi pupuk bersubsidi juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui, produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.



**Gambar 1. Alur Distribusi Pupuk Subsidi**

(Sumber, Kementerian Pertanian TA 2022)

Pendistribusian pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan regulasi yang ada, terlihat pada gambar penyaluran dimulai

melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada kelompok tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyalur di lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK.

Alur distribusi pupuk subsidi yang panjang menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti distribusi pupuk terkendala kelangkaan pupuk, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga diatas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar nonsubsidi dan antar wilayah (Kariyasa & Yusdja, 2005). Masalah lain yang ditimbulkan oleh kebijakan subsidi pupuk, yaitu: distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat. (Hadi *et al*, 2007) menjelaskan bahwa, kebijakan subsidi dan sistem distribusi pupuk yang amat komprehensif, tidak menjamin ketersediaan pupuk ditingkat petani. Masalah yang muncul akibat terdapat dua pupuk di pasaran (subsidi dan nonsubsidi), diantaranya: pengoplosan pupuk subsidi dan nonsubsidi, penyebaran isu tentang kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya mahal, terjadi penimbunan dan penggantian kemasan pupuk subsidi menjadi pupuk tidak disubsidi (Badan Kebijakan Fiskal, 2017). Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan alur pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) merupakan kebutuhan riil petani untuk satu periode dalam pengelolaan usaha tani. Rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur (Winarti, 2016). Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani dengan dibantu oleh penyuluh lapangan.

Namun, perlu diketahui bahwa jumlah kebutuhan pupuk yang tertera di RDKK berbeda dengan alokasi pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam melakukan pembayaran kepada produsen. Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi maka penyaluran pupuk harus dilakukan secara proporsional sesuai RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani didampingi penyuluh pendamping dan alokasi yang telah disediakan. Berikut data alokasi subsidi pupuk di Indonesia tahun anggaran 2023:

**Tabel 1. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023**

Jenis Pupuk	Alokasi Ton
<b>UREA</b>	5.570.330
<b>NPK</b>	3.232.373
<b>NPK Formula Khusus</b>	211.003
Jumlah	<b>9.013.706</b>

*Sumber: Kementerian Pertanian, 2023*

Pengalokasian pupuk bersubsidi diatas dapat berubah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengalokasian yang harus sesuai antara RDKK dan alokasi yang disediakan, penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi (Lini IV) ke petani/kelompok tani harus sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum sesuai dengan regulasi. Hal ini berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2009) dalam (Gunawan & Pasaribu, 2020) yang menyatakan bahwa kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi HET, margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, dan disparitas harga antara pupuk

bersubsidi dan nonsubsidi menyebabkan pendistribusian pupuk bersubsidi belum tepat sasaran. Berikut harga eceran tertinggi pupuk non subsidi:

**Tabel 2. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Non Subsidi Tahun 2023**

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Per Kg</b>
UREA	Rp. 9.000,-
SP-36	Rp. 5.000,-
NPK PHONSKA	Rp. 20.500,-

*Sumber: SP2KP Kemendag*

Adapun harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022:

**Tabel 3. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023**

Jenis Pupuk	Per Kg
<b>UREA</b>	Rp. 2.250,-
<b>NPK PHONSKA</b>	Rp. 2.300,-
<b>NPK Formula Khusus</b>	Rp. 3.300,-

*Sumber: Permentan No. 10 Tahun 2022*

Dengan adanya ketetapan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah, maka petani dapat melakukan pelaporan apabila ada distributor atau pengecer yang menjual harga eceran pupuk bersubsidi melebihi harga yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu, kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan Pemerintah ini dapat dikurangi. Demi terjaminnya penyaluran pupuk bersubsidi yang optimal dan tepat sasaran maka pada tahun 2017 berdasarkan rekomendasi dari Litbang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan uji coba penebusan pupuk bersubsidi oleh petani ke pengecer resmi melalui Kartu Tani. Program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini dimulai di Pulau Jawa pada tahun 2018 yakni, Banten,

Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Program tersebut kemudian, diterapkan ke Provinsi luar Jawa yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Program ini digagas berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2018.

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang sudah menerapkan pendistribusian pupuk subsidi melalui kartu tani. Namun, terkhususnya di Provinsi Lampung pendistribusian pupuk subsidi disalurkan melalui program Kartu Petani Berjaya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020. Petani yang telah melakukan registrasi untuk menjadi anggota kartu petani berjaya tercatat berjumlah 806.809 petani yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selain untuk penebusan pupuk bersubsidi kartu petani berjaya juga dapat digunakan sebagai informasi laporan keuangan usaha, peminjaman KUR, kepastian pemasaran hasil panen, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan kartu petani berjaya, petani harus tergabung dalam kelompok tani. Jenis dan jumlah pupuk subsidi yang diterima petani melalui kartu petani berjaya sesuai dengan luas lahan, komoditas dan jenis pupuk yang disusun melalui Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) oleh penyuluh bersama petani yang kemudian diupload ke Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI).

**Tabel 4. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 Menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten/Kota	Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1.	Lampung Barat	7.819	15.243	309
2.	Tanggamus	12.288	20.000	1.933
3.	Lampung Selatan	66.178	37.540	1.612
4.	Lampung Timur	70.545	38.635	1.556
5.	Lampung Tengah	78.194	33.905	745

6.	Lampung Utara	18.577	18.568	122
7.	Way Kanan	13.961	15.085	175
8.	Tulang Bawang	23.112	10.570	0
9.	Pesawaran	16.301	10.213	3.867
10.	Pringsewu	10.319	10.320	648
11.	Mesuji	14.043	8.652	0
12.	Tulang Bawang Barat	5.077	3.446	0
13.	Pesisir Barat	5.732	5.310	160
14.	Bandar Lampung	330	200	0
15.	Metro	1.831	832	0
	<b>Jumlah</b>	<b>344.307</b>	<b>228.519</b>	<b>11.127</b>

*Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Lampung TA 2023*

Provinsi Lampung pada tahun 2023 memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebesar 583.953 ton. Alokasi pupuk subsidi tersebut diperuntukkan kepada 691.097 petani. Lampung memperoleh alokasi pupuk bersubsidi terbesar kelima diluar pulau Jawa setelah Provinsi Sumatera Selatan. Alokasi pupuk subsidi tersebut terbagi menjadi enam jenis, yakni pupuk urea 344.307 ton, pupuk NPK 228.519 ton, dan pupuk NPK Formula Khusus untuk tanaman kakao sebesar 11.127 ton. Meskipun kuota pupuk bersubsidi bertambah tetap saja belum mampu memaksimalkan kebutuhan pupuk yang diinginkan petani.

Aktor kebijakan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya yakni, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung yang kemudian, Dinas Pertanian yang berada di Kabupaten khususnya, Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat meneruskan kebeberapa desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya, melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Berdasarkan pelaksanaannya Balai Penyuluhan Pertanian membentuk struktur organisasi yang bertugas mengelola dan melaksanakan program penebusan pupuk melalui kartu petani berjaya.

Pelaksanaan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerapkan program tersebut. Zaidirina selaku Pejabat Bupati Tulang Bawang Barat menyampaikan sebanyak 26.129 NIK sudah teregistrasi sebagai anggota kartu petani berjaya. Adapun alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/721/V.21/HK/2022 yakni, pupuk urea 5.077 ton, dan pupuk NPK 3.466 ton. Semua alokasi pupuk ini diperuntukkan untuk petani yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat, salah satunya di Kecamatan Tumijajar yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi dengan jumlah penerima sekitar 4.624 NIK.

Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar merupakan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkenal dengan sektor pertaniannya, karena hampir sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ditandai dengan adanya 23 kelompok tani dengan jumlah total 542 petani, jumlah ini tentunya merupakan angka yang cukup besar untuk diperhatikan kelangsungan aktivitas pertaniannya. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar faktanya masih belum memenuhi ukuran keberhasilan. Meski mempunyai kartu petani berjaya, petani di Tiyuh Margo Mulyo kesulitan mendapatkan pupuk yang saat ini disubsidi. Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ada kuota pupuk, namun berdasarkan kebutuhan pupuk, petani sudah menyiapkan dananya ternyata tidak ada di Kios Pupuk Lengkap (KPL). Selain itu, keterlambatan pengiriman pupuk subsidi berdampak *negative* pada hasil dan kualitas produk pertanian. Masalah lainnya adalah alokasi pupuk bersubsidi yang jauh lebih rendah dari angka pemesanan pupuk bersubsidi diawal. Terlebih lagi, pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian. Dimana



terdapat perubahan pada jumlah jenis pupuk bersubsidi yang semula terdapat 6 jenis pupuk yaitu, ZA, Urea, SP-36, NPK, Pupuk Organik dan Pupuk Organik Cair, berubah menjadi 2 jenis pupuk saja yaitu, Urea dan NPK. Begitu pula dengan komoditas yang disubsidi sebelumnya berjumlah lebih dari 60 jenis, pada kebijakan Permentan No. 10 Tahun 2022 kini mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi diprioritaskan pada 9 komoditas utama yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu dan kakao.

Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya menunjukkan bahwa sistem penerapan kebijakan oleh pemerintah belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan temuan di lapangan yaitu, pemegang kartu petani berjaya serta pemilik kios masih menggunakan mekanisme lama penyesuaian pupuk bersubsidi karena kendala-kendala seperti adanya ketidakpahaman para petani dan pemilik kios dalam penggunaan kartu petani berjaya. Sebagian petani merasa mekanisme baru penyesuaian pupuk bersubsidi menggunakan kartu petani berjaya lebih rumit sehingga tujuan dari program pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya ini masih belum tercapai. Para petani kurang informasi dalam tata cara penggunaan kartu petani berjaya dari petugas penyuluh lapangan, Hal ini dapat dilihat dari kurangnya jumlah dukungan sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi tentang tujuan program kartu petani berjaya oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) kepada para petani, dan kebanyakan para petani kurang melek teknologi informasi. Masalah lain yakni, sarana dan prasarana yang masih perlu dilakukan pembenahan, sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya dapat dilakukan secara optimal.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketepatan dan kesesuaian program dengan kebutuhan agar menjadi gambaran mengenai kebijakan kartu petani berjaya yang telah diterapkan. Gambaran yang nantinya

diperoleh merupakan data yang menunjukkan keberhasilan pendistribusian pupuk bersubsidi sampai ketangan petani. Selain itu, data yang diperoleh menjadi data tambahan bagi penyuluh pertanian. Menariknya penelitian ini dilakukan karena fenomena yang terjadi begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari peneliti, dan juga dapat mendeskripsikan dan memahami terkait prosedur pendistribusian pupuk bersubsidi melalui program kartu petani berjaya dengan menggunakan disiplin ilmu administrasi negara. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (studi Di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat)?
2. Apa faktor penghambat dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh deskripsi dan analisa mengenai pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya (studi di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat)
2. Teridentifikasinya faktor penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya (studi di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat)

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian atau rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi negara terutama dalam kajian implementasi kebijakan sebagai bagian dari tahapan kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi khalayak umum mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi bagi pimpinan dan pihak yang berwenang, serta sebagai rekomendasi atau masukan bagi pemerintah daerah mengenai sejauh mana pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi, baik relevansi dalam hal teori yang digunakan, objek penelitian, metode penelitian, maupun dalam aspek lainnya. Beberapa penelitian terdahulu tersebut akan dijelaskan pada sub bab ini untuk mengetahui persamaan maupun perbedaannya.

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nabela <i>et al</i> , (2022)	Implementasi Penebusan Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo	Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu terlihat belum optimal dikarenakan jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan belum mampu mencukupi kebutuhan petani dan juga terdapat salah satu jenis pupuk yang dijual diatas standar harga eceran tertinggi. Hambatannya adalah kuota pupuk bersubsidi yang terbatas, karakteristik sebagian agen penyalur dan ketidaksiapan sebagian petani di Kecamatan Bathin III Ulu.
2.	Joko Raharjo (2022)	Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	Implementasi kebijakan dalam penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani di Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo kapanewon Sewon sudah berjalan dengan baik dan teknis penebusan pupuk bersubsidi dilakukan secara kolektif oleh Kelompok Tani Sedyo Utomo serta sudah sesuai aturan regulasi yang sudah ada, akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Terdapat hambatan seperti transportasi

---

3.	Fenti Yunita dan Ria Angin (2021)	Peran Penyuluh Pertanian Dalam Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	kelompok tani yang belum ada, biaya dan jarak rumah jauh dari Kios Pupuk Lengkap (KPL), Transportasi dibebankan kepada petani, banyak petani yang sudah lansia. Menggunakan konsep peran Soerjono Soekanto dan teori model implementasi Merilee S. Grindle. Fakta menunjukkan bahwa peran yang dimiliki aktor pelaksana sangat penting sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan dengan baik di Kecamatan Kedungjajang. Peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif penyuluh pertanian sama-sama berjalan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh sehingga aspirasi dari petani dapat tersalurkan dengan baik.
----	---	--	--

---

*(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2023)*

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian ini di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, perbedaan selanjutnya penelitian berfokus pada implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya. Kemudian, perbedaan selanjutnya terletak pada analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle untuk menganalisis implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya dengan berlandaskan pada dua indikator dalam model teori Merilee S. Grindle. Serta perbedaan yang terakhir pada penelitian ini adalah peneliti juga menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## 2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua konsep dasar yaitu, kebijakan dan publik. Kebijakan adalah keputusan pemerintahan yang dibuat oleh para aktor kebijakan yang mempunyai kekuasaan. Publik adalah masyarakat umum atau rakyat. Oleh karenanya kebijakan publik merupakan keputusan Negara atau Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan (Meutia, 2021) Kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara para aktor pembuat kebijakan dengan fenomena yang harus dicarikan solusinya dan bersifat terikat, tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat yang berguna untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi kebijakan publik pada hakekatnya adalah keputusan untuk memilih nilai-nilai yang terbaik dari banyak nilai yang ada (Sulistio, 2013).

Beberapa konsep kebijakan telah banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya pendapat dari Thomas R. Dye dalam (Wahab, 2008) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dimana fokus dari kebijakan publik ini adalah seluruh kehendak pemerintahan dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan ataupun keputusan tidak harus mengeluarkan atau membuat suatu kebijakan.

Selain itu, kebijakan menurut Riant Nugroho dalam (Tahir, 2014) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat

oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Riant Nugroho adalah suatu kebijakan itu bersifat mengikat, dimana seluruh keputusan ada di tangan pemerintah dan pembuat kebijakan, didalam suatu kebijakan akan di bentuk sanksi-sanksi yang sesuai dengan permasalahannya.

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah adalah orang yang memiliki kekuasaan penuh terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan mereka memiliki upaya dalam pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakatnya. Kebijakan dapat diartikan sebagai hukum. Dimana, suatu kebijakan yang telah disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dapat menjadi suatu Undang-Undang atau hanya menjadi Peraturan Pemerintah atau bahkan Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut akan berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

## **2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan aturan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut (Winarno, 2016) menjelaskan secara luas implementasi kebijakan mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik pekerjaan bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi ini merupakan sebuah peraturan yang juga melibatkan aktor baik itu pemerintah maupun organisasi yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan dari suatu kebijakan.

Menurut Grindle dalam (Subianto, 2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Usman, 2002) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sementara itu, (Setiawan, 2004) berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Beberapa uraian yang dikemukakan mengenai implementasi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pelaku administrasi untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Fokus utama dari kebijakan adalah di mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, dan penjelasan yang menyebabkan tujuan atau sasaran kebijakan tercapai atau tidak.

### **2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik**

Proses implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu kerangka pemikiran dalam proses implmentasinya. Pada proses implementasi kebijakan dibutuhkan komponen-komponen dalam sistem implementasi kebijakan. adapun komponen-komponen pada sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas (1)program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2)*target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3)unsur pelaksana (implementor),



baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Selain itu, terdapat fokus keberhasilan Van Horn dan Van Meter (1975) serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) dalam (Tresiana & Duadji, 2019). yang memahami dan menjelaskan permasalahan proses implementasi kebijakan menjadi dua kelompok, yaitu melalui pendekatan *top-down* dan *botton-up*.

Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti yang menggunakan pendekatan *top-down* ialah memilih kebijakan yang akan dikajikan mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan secara formal tercantum dan dokumen kebijakan, mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran yang baik (sesuai dengan *Standart Operating Procedure* yang ada), mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran, mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima analisis kemudian, diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan (Tresiana & Duadji, 2019).

Sedangkan pendekatan *botton-up* diperoleh dari hasil ketidakpuasan dan kritik berdasarkan pendekatan *top-down*. Padahal menurut para pengkritik pendekatan *top-down*, realistis implementasi kebijakan bisa menjadi kompleks dan tidak hanya berkepentingan dengan isu, efektivitas atau efisiensi implementasi kebijakan saja. Tetapi, karena ketidakpuasan dari beberapa peneliti maka tercetuslah pendekatan yang disebut *botton-up*. Pendekatan *botton-up* merupakan pendekatan yang menggunakan logika

berpikir dari ‘bawah’ ke ‘atas’ yakni pendekatan yang berawal dari keinginan masyarakat yang disalurkan pada pemerintah kemudian pemerintah membuat peraturan dengan kewenangan yang dimiliki melalui berbagai pertimbangan, menurut Parsons (Nurchayanto, 2016) model *botton-up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus, Parsons juga mengatakan bahwa dalam model pendekatan *botton-up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasan dalam penerapan kebijakan.

Dalam menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya ini, peneliti juga menggunakan pendekatan *top-down* didalam analisi implementasi kebijakan. hal ini dikarenakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang dilanjutkan ke bawah untuk dapat diimplementasikan ke masyarakat.

Pada proses implementasi kebijakan, program dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain, tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sedangkan, pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan (Samiri, 2019). Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses dan gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, namun hal tersebut nyatanya dapat terjadi sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai (Ramdhan & Ramdhan, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan proses implementasi kebijakan berdasarkan tatanan praktis dari (Mulyadi, 2015) yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar yang meliputi: (1) Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan; (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; (3) Kesiadaan kelompok

sasaran untuk menjalankan keputusan; (4) Dampak keputusan; dan (5) Upaya perbaikan.

### 2.3.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Menurut (Agustino, 2016) mengkategorikan beberapa model implementasi kebijakan publik. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan implementasi kebijakan yaitu, pendekatan yang berpola dari atas kebawah (*top down*) dan pendekatan dari bawah keatas (*bottom up*). Implementasi kebijakan publik mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya, yaitu :

#### a. **Model Implementasi Kebijakan Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Abdal, 2015). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana

- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

**b. Model Implementasi Kebijakan Edwards III**

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yakni : 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari dua pertanyaan tersebut kemudian model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu : *communication, resources, dispositions and bureaucratic structure*.

**c. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dikenal dengan istilah *Implementation as a Political and Administrative Process*, yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun rapi, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat

melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Grindle dalam (Agustino, 2016) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi dapat dilihat melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

a. Kepentingan kelompok sasaran (*interest of the target groups*)

Indikator dalam model implementasi kebijakan Grindle ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam prosesnya akan melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasinya, hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe manfaat yang dihasilkan (*type of benefits*)

Dalam isi kebijakan (*content of policy*) telah dijelaskan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan, kemudian dikomunikasikan kepada para pelaksana sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan dan kendala pada masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui manfaat apa yang akan mereka dapat dari sebuah kebijakan yang

telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envision*)

Target yang akan dicapai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai dari suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e. Pelaksana program (*program implementor*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. Sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik atau peralatan.

## 2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

Lingkungan Kebijakan menurut Grindle juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Lingkungan kebijakan yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari apa yang diharapkan.

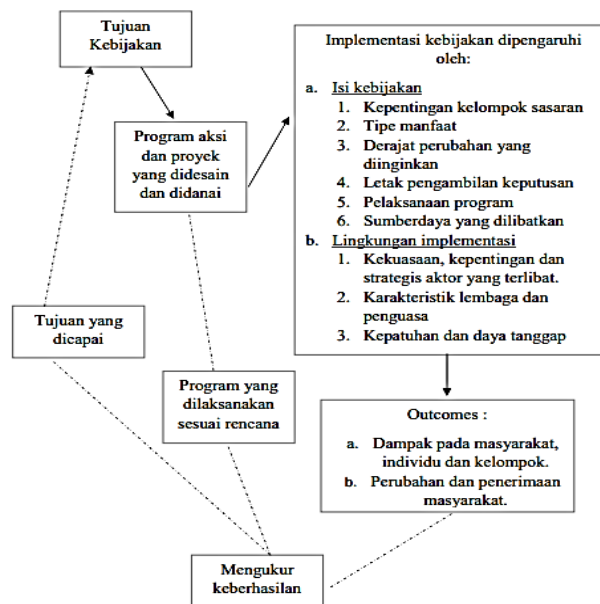


- b. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*)

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (*responsiveness and compliance*)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.



**Gambar 2. Pendekatan Implementation as A Political and administrative Process**

Sumber: Merilee S. Grindlle (Agustino, 2016)

Dari penjelasan diatas terkait model-model implementasi maka peneliti memilih model Merilee S Grindle sebagai fokus penelitian karena model ini sesuai dengan fokus dari penelitian yakni “Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” Penelitian menurut model Merilee S Grindle berfokus kepada 2 unsur yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Peneliti memilih model ini karena penelitian ini sesuai dengan unsur-unsur yang dipaparkan oleh Merilee S Grindle.

#### **2.4 Pengertian Pupuk Bersubsidi**

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin ketersediaanya dan harganya sesuai harga eceran tertinggi (HET) pupuk.

Peraturan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan alokasi pupuk di masing-masing daerahnya, untuk selanjutnya aturan tersebut menjadi pedoman bagi produsen, distributor, dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk

kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Namun, dengan adanya pembaharuan kebijakan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian, jenis pupuk yang mendapatkan subsidi hanya Urea dan NPK.

Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengusulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian setempat. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan HET sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

## **2.5 Program Kartu Petani Berjaya**

### **2.5.1 Pengertian Kartu Petani Berjaya**

Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu program yang menjadi upaya di bidang pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, melalui pemberian kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit dan obat-obatan), kepastian ketersediaan modal, pembinaan manajemen usaha tani, penanganan pasca panen, penjaminan harga jual dan kepastian penyerapan hasil produksi pertanian. Program ini berjalan menggunakan model sistem kartu petani berjaya yang terdiri dari sistem

kelembagaan yang mengatur hubungan antara lembaga terkait didalam sistem. Kemudian, adanya sistem teknologi informasi sebagai penunjang utama berjalannya sistem kelembagaan ini. Berjalannya sistem teknologi informasi tersebut, khususnya bagi para petani diwujudkan dalam bentuk kartu yang disebut Kartu Petani Berjaya.

Kartu petani berjaya memiliki keunikan sistem kerja yaitu, rencana usaha secara digital berdasarkan rekomendasi terbaik para ahli, perencanaan meliputi kebutuhan saprotan per masa tanam, jadwal tanam, biaya kegiatan hingga keuntungan yang dapat dihasilkan petani, laporan usaha yang didasarkan kegiatan petani selama masa tanam yang merupakan realisasi usaha sebagai tolak ukur keberhasilan usaha tani, serta sebagai acuan kelayakan permodalan oleh bank, dan keanggotaan KPB yang menyatukan seluruh pihak yang terkait dengan pertanian secara luas untuk kemudahan dan keamanan arus transaksi mulai dari hulu ke hilir.

### **2.5.2 Manfaat Kartu Petani Berjaya**

Adapun manfaat KPB yang diberikan pada petani antara lain: Memudahkan petani mendapatkan permodalan.

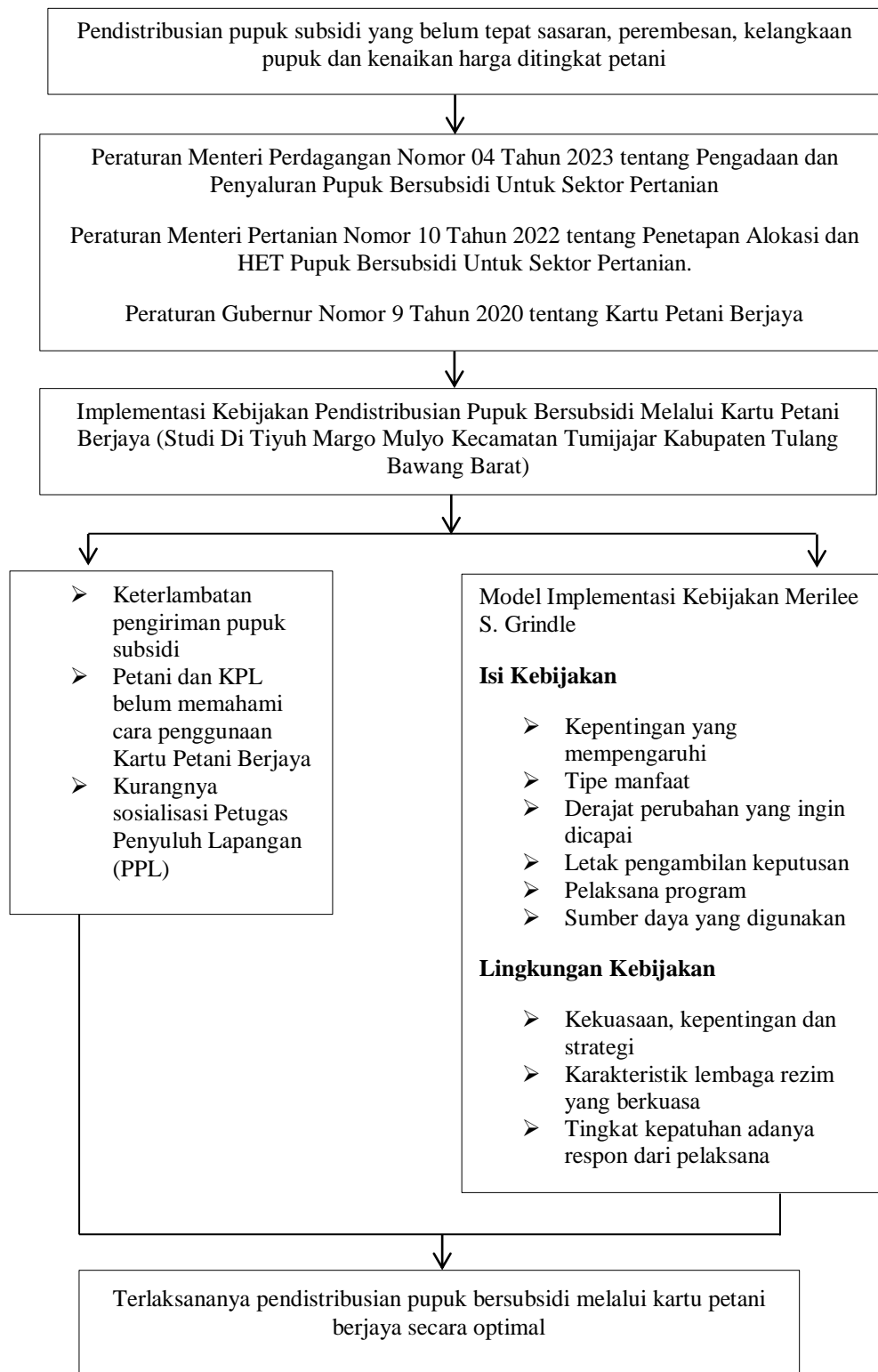
1. Kepastian ketersediaan pupuk, benih, obat-obatan baik yang digunakan pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik subsidi maupun non subsidi
2. Kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik; pembinaan, baik budidaya, teknologi maupun hilirisasi
3. Dukungan Asuransi Usaha maupun Asuransi lainnya.
4. Fasilitas sosial program pemerintah maupun swasta (beasiswa anak petani dan bantuan sosial lainnya).
5. Informasi dan laporan keuangan usaha.
6. Informasi terkini rekomendasi teknologi usaha.

## 2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan diidentifikasi masalah yang terjadi. Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan dalam penelitian. pendistribusian pupuk bersubsidi yang dijual terbuka menyebabkan terjadinya penyaluran pupuk yang belum tepat sasaran, perembesan, kelangkaan pupuk dan kenaikan harga ditingkat petani. Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di pengecer resmi yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2018. Kemudian, pada tahun anggaran 2023 penyaluran pupuk subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sehingga diharapkan pendistribusian pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi petani yang berhak menerima.

Pada Provinsi Lampung, pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan Kartu Petani Berjaya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020. Salah satu daerah di Provinsi Lampung yang sudah menerapkan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar merupakan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkenal dengan sektor pertaniannya, karena hampir sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun, dalam rangka implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar faktanya masih banyak permasalahan yang terjadi. Dengan melihat adanya permasalahan yang terjadi peneliti mengukur proses

pencapaian *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi Di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat) dengan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Penggunaan Teori Merilee S. Grindle akan mempermudah peneliti dalam membahas implementasi kebijakan publik dengan melihat isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sehingga dapat tercapainya pendistribusian pupuk subsidi secara optimal.



**Gambar 3. Kerangka Pemikiran**

(Sumber: diolah peneliti, 2023)

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam (Asfiah, 2012), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara lengkap.

Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak *setting* tertentu yang dikaji dalam sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelaahnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang komperhensif.

Penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu



petani berjaya. Hal ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana meningkatkan produksi usaha tani melalui implementasi kebijakan pemberian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya dengan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan maupun narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan penelitian.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan peneliti gunakan dalam suatu penelitian, sehingga tidak terjadinya pembesaran masalah yang ada. Sesuai dengan judul penelitian, maka sasaran atau fokus penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Adapun perincian fokus sesuai dengan kerangka pikir penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan kebijakan (*context policy*). Unsur-unsur yang mempengaruhinya adalah :

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)
  - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya dalam pelaksanaannya pasti bertujuan untuk melindungi suatu kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap isi implementasi kebijakan.
  - b. Tipe Manfaat (*Type of Benefit*), Pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa

dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change Envision*), Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak akan dicapai, adapun yang akan dijelaskan dalam point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dan atau ingin dicapai oleh pihak-pihak terkait mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*), Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan mengenai berbagai permasalahan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya.
- e. Pelaksana Program (*Program Implementer*), ketika menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Pada penelitian ini akan diulas siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*), merupakan segala hal yang digunakan guna mendukung kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya, baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun sarana dan prasarana terkait

pelaksanaan Program pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya.

## 2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

- a. Kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat (*Power, interest and strategy of aktor involved*), dalam Program pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya berdasarkan kepentingan masing-masing aktor.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*), lingkungan dimana Program pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya dilaksanakan tentu berimplikasi terhadap jalannya program, maka pada bagian ini karakteristik dari lembaga yang akan dideskripsikan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*), hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya. Hal tersebut berdampak terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan program.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan, sementara itu,

geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada lokasi, yaitu Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan alasan, yaitu seperti kondisi wilayah dan lingkungan. Pertama, potensi sumber daya alam di Tiyuh Margo Mulyo yang cukup baik, khususnya dipertanian. Seperti sawah, lahan kering dimana pemanfaatan kedua lahan tersebut meliputi tanaman jagung, padi, kelapa, dan lain sebagainya. Kedua, lingkungan petani di Tiyuh Margo Mulyo sangat kompak khususnya dalam melakukan proses budidaya komoditasnya ditandai dengan adanya kelompok tani sebanyak 23 kelompok tani. Selain itu, Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar adalah Tiyuh yang sudah mendapatkan kartu petani berjaya. Dalam perkembangannya Tiyuh Margo Mulyo lebih maju dibandingkan dengan daerah lain dari segi penerimaan dan keikutsertaan petani.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan penelitian maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya (sumber data). Data primer disebut juga sebagai sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi langsung di Kantor Pertanian Tulang Bawang

Barat, Kantor KPB *center* dan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Tumijajar serta mewawancarai petani penerima manfaat program.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data tambahan yang akan melengkapi data peneliti apabila data yang dibutuhkan tidak tersedia dari narasumber yang fungsinya sebagai data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal maupun berita yang terkait dengan penelitian, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara/ daftar pertanyaan) yang telah disiapkan. Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkrit tentang perilaku kebiasaan dalam pengimplementasian kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

**Tabel 6. Informan Penelitian**

No.	Nama informan	Jabatan
1.	Sayu Made Budiarni, S.P., M.M	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tulang Bawang Barat
2.	Meriyanto, S.P	Koordinator Penyuluhan Pertanian Tulang Bawang Barat (KPB <i>Center</i> )
2.	Muh. Ali Gufron, S.P	Koordinator Penyuluhan Pertanian Tumijajar
3.	Legiman	Ketua gapoktan
4.	Giono	Anggota poktan

(Sumber: Diolah Peneliti, 2023)

## 2. Observasi

Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang fokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat langsung dalam kegiatan implementasi kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi Di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang didapati dari hasil observasi dan wawancara. Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berupa arsip data maupun gambar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**Tabel 7. Data Dokumen Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Dokumen</b>	<b>Substansi Dokumen</b>
1	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	Dasar hukum dari UU perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2.	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi</li> <li>• Menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi</li> </ul>
3.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022	Mengetahui kriteria penerima pupuk subsidi
4.	Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022	Mengetahui petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi
5.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar pelaksanaan distribusi pupuk subsidi melalui kartu petani berjaya</li> <li>• Arahan-arahan mengenai sistematika pelaksanaan kartu petani berjaya</li> </ul>

*(Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2023)*

### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode dalam analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data hal ini sangat penting agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur dalam pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Menurut (Moleong, 2017) analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara bertahap dan berkelanjutan melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian akan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian data

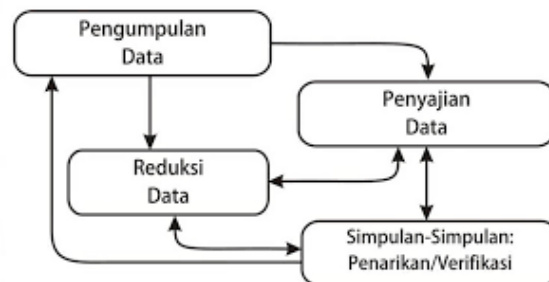
Langkah kedua dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan



informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya.

### 3. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan teknik menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam bentuk hasil kesimpulan. Bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terusmenerus tujuannya untuk diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded” dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.



**Gambar 4. Teknik Analisis Data**

*Sumber: (Miles dan Huberman, 2014)*

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keaslian (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Penelitian kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Artinya keabsahan data merupakan standar validitas dari

data yang diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2016), terdapat empat teknik dalam uji keabsahan, diantaranya:

1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas berdasarkan triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2016) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Penelitian ini memperoleh sumber data terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yakni Dinas Pertanian, PPL, Pihak KPB *Center* dan Petani. Berdasarkan informasi data tersebut dideskripsikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Peneliti mencoba memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dengan demikian penelitian mengenai pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya (studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat) dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi jelas dan paham terhadap hasil penelitian ini.

3. Uji Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability/Reabilitas*)

Uji *Dependability* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan dependable apabila peneliti dapat membuktikan bahwa sebagian besar proses penelitian benar-benar dilakukan selama berlangsungnya penelitian (Sugiyono, 2016). *Dependability* bertujuan untuk memastikan hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani

berjaya (studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat) telah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Pengujian terhadap data penelitian dilakukan dengan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Objektivitas dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono, 2016). Sehingga pada tahap ini peneliti harus mampu menjelaskan proses awal hingga akhir penelitian mengenai pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya (studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

## V. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Keberhasilan implementasi kebijakan yang dibuat dapat terlihat dari *outcomes* atau proses pencapaian hasil akhir. Grindle menegaskan bahwa proses implementasi akan berjalan jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan serta program kegiatan telah tersusun. Implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada prinsipnya sudah berjalan cukup optimal ditinjau dari perspektif Merilee S. Grindle yang dapat dilihat melalui dua variabel yakni:

Pertama, unsur isi kebijakan (*Content of Policy*), pada indikator isi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan yang mempengaruhi, derajat perubahan yang ingin dicapai, pelaksana program, dan letak pengambilan keputusan sudah cukup baik. Namun, pada indikator yang berhubungan dengan kelompok sasaran yakni indikator tipe manfaat dan sumber daya yang digunakan masih ditemukan reaksi ketidakpuasan target group terhadap kebijakan yakni pendistribusian pupuk subsidi di Tiyuh Margo Mulyo masih belum sepenuhnya menggunakan kartu petani berjaya, keterlambatan pengiriman pupuk dan kuota pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dirasa memberatkan petani. Serta kurangnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan sumber dana untuk sosialisasi seperti konsumsi bagi para petani masih menggunakan dana mandiri dari PPL dan Tiyuh.

Kedua, unsur lingkungan kebijakan (*Context of Policy*) ditemukan kelemahan pada indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang

terlibat yakni strategi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Penyuluh lapangan adalah melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang dilakukan penyuluh tidak merata hanya pengurus kelompok tani saja. Mengenai aspek karakteristik lembaga pelaksana maupun tingkat kepatuhan dan respon pelaksana sudah berjalan cukup baik.

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi yakni pertama, keterbatasan sumber daya manusia di lapangan menjadi faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan penyuluh, proses validasi NIK masih sering mengalami permasalahan baik itu teknis atau jaringan, dan terakhir petani yang sudah lanjut usia sangat sulit memahami langkah-langkah penebusan pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya begitupun dengan kios.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa yakni sebagai berikut:

1. Guna meningkatkan program kartu petani berjaya diharapkan *stakeholder* dapat berkontribusi dalam penyebarluasan informasi penggunaan layanan e-KPB kepada petani.
2. Diharapkan penambahan jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan peningkatan dalam melakukan pendampingan terhadap petani dan kios.
3. Diharapkan dengan adanya program kartu petani berjaya permasalahan mengenai 6 Tepat (tepat jenis, tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga) dapat teratasi sehingga kesejahteraan petani meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. DIPABOPTAN.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Anwar, M. (2020). *Manajemen Strategik: Daya Saing Dan Globalisasi*. Banyumas: Sasanti Institute.
- Asfiyah, S. (2012). *Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi Di Kabupaten Probolinggo*.
- Barusman, M. Y. S. (2021). PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI LAMPUNG. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 5, 1126–1135.
- Butaflika, B., Haryono, D., & Endaryanto, T. (2022). *THE IMPACT OF THE KARTU PETANI BERJAYA PROGRAM ON RICE PRODUCTION AND INCOME IN PRINGSEWU DISTRICT*. 10(2), 163–176.
- Fiskal, B. K. (2017). “*Seri Analisis Kebijakan Fiskal: Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*.” PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). PERSEPSI PETANI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI UNTUK Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 131–144. <https://doi.org/10.14203/JEP.28.2.2020.131-144>
- Hadi, P. ., Swastika, D. ., Dabukke, F. B. ., Agustin, N. ., Siregar, M., Hidayat, D., & Maulana, M. (2007). Analisis Penawaran dan Permintaan Pupuk di

Indonesia 2007 – 2012. *Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Bogor.*

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.

Kariyasa, K., & Yusdja, Y. (2005). Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia: Kasus Provinsi Jawa Barat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(3), 201–216.

Kasiyati, S. (2004). SEKTOR PRODUKSI DAN TINGKAT PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI JAWA TENGAH (Pendekatan Analisis I-O dan SNSE Jawa Tengah Tahun 2004). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6(1), 28–45.

Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A method Sourcebook Amerika*. United State of Amerika.

Meutia, I. F., Sujadmiko, B., Yulianti, D., Putra, K. A., & Aini, S. N. (2021, December). The Agenda Setting Policy for Hajj and Umrah in Post Pandemic. In 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) (pp. 32-37). Atlantis Press.

Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT LeutikaPrio.

Nabela, A. A., Sari, M., Astika, Y. W., & Wismar, T. (2022). *Implementasi Penebusan Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo*. 6(2). <https://doi.org/10.56957/jsr.v6i2.227>

Nurchayanto, H. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Di Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 57.

Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Public*. CV Maulana Media Grafika.

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2018.

Raharjo, J. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul*. 6(1), 39–57.

Ramadhani, A., & Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 3–5.

Samiri, M. (2019). Analisis Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan (Teori dan Praktik). *Academia*, 13–15.

Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.

Sriwinarti, N. K., & Faesal, A. (2016). *Implementasi Penggunaan Kartu Petani : Sebagai Media Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi*. 8, 191–195.



- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Brilliant.
- Sulistio, E. B. (2013). *Kebijakan Publik (Public Policy) Buku Ajar Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Thahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV Sinar Baru.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101–105.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Med Press.
- Yunita, F. (2022). *PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG*.